

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan alasan PBB tidak melakukan intervensi kemanusiaan di perang sipil Sri Lanka pada periode 2008-2009. Perang sipil Sri Lanka yang terjadi antara kelompok pemberontak Tamil, *Liberation Tiger of Tamil Ealam* (LTTE), dan pemerintah Sri Lanka telah berlangsung selama hampir tiga dekade (1983-2009). Beberapa upaya perdamaian tidak mampu untuk menyelesaikan konflik yang berlangsung. Pada tahun 2008 perang sipil Sri Lanka mengalami eskalasi konflik yang ditandai dengan konfrontasi antara militer Sri Lanka dan LTTE. Konfrontasi antara pihak militer pemerintah dan LTTE diperkirakan menimbulkan 40.000 korban dari masyarakat sipil. Banyaknya masyarakat sipil yang menjadi korban menimbulkan kecaman dari masyarakat dunia terhadap pemerintah Sri Lanka dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang perdamaian dan perlindungan HAM, PBB dinilai gagal dalam mencegah semakin banyaknya korban jiwa dalam perang sipil Sri Lanka. Penelitian ini menggunakan teori *failed state* dan dukungan negara besar yang disintesis dengan konsep intervensi kemanusiaan untuk menjelaskan alasan PBB tidak mengintervensi perang sipil Sri Lanka. Di dalam teori *failed state* terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menunjukkan Sri Lanka bukan sebagai *failed state*, sehingga menjadi salah satu alasan bagi PBB untuk tidak melakukan intervensi. Teori dukungan negara besar digunakan untuk menjelaskan bahwa tidak adanya dukungan dari negara-negara besar dapat memengaruhi keputusan PBB untuk tidak mengintervensi perang sipil Sri Lanka.

Kata Kunci: perang sipil, eskalasi konflik, Sri Lanka, PBB, perlindungan HAM, intervensi kemanusiaan